

## Laporan Kegiatan APLINDO

Bulan November 2021

| No | Tanggal    | Kegiatan   |
|----|------------|--|
| 1  | 01/11/2021 | Webinar Infrastructure Connect Digital Series: "Pembangunan Infrastruktur Gas Di Indonesia Dalam Rangka Mendukung Percepatan Infrastruktur Gas Bumi Nasional".   |
| 2  | 08/11/2021 | Undangan FGD Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Kajian Analisis Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Terhadap Sektor Industri.                               |
| 3  | 11/11/2021 | Undangan Narasumber dalam Diskusi Identifikasi Kendala Utama Industri Manufaktur Dan Upaya Debottlenecking Untuk Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional |
| 4  | 12/11/2021 | Pertemuan Pengurus APLINDO dengan Kasub Logam Kemenperin   |
| 5  | 12/11/2021 | Bimtek Self-Assesment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)  |
| 6  | 15/11/2021 | Forum Group Discussion (Diseminasi) Studi Dampak Ekonomi Penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu Di Sektor ILMATE Untuk Peningkatan Daya Saing Industri.             |
| 7  | 15/11/2021 | 12th KOMPAS100 CEO Forum Series 3 "Sustainability Action"  |
| 8  | 15/11/2021 | Rapat Pengurus APLINDO- Draft Kajian Skrap SS Dan Aluminium  |
| 9  | 18/11/2021 | 12th KOMPAS100 CEO Forum "Ekonomi Sehat 2022"  |
| 10 | 18/11/2021 | RSNI 3 Jejak Pendapat Standar Bentonite  |
| 11 | 23/11/2021 | Pembahasan SE Menperin Dengan Asosiasi Industri Tentang PPKM Nataru 2021   |
| 12 | 25/11/2021 | Undangan Narasumber dalam FGD Logam -Circular Economy  |

**1. Pada tanggal 1 November 2021, APLINDO menghadiri webinar Infrastructure Connect Digital Series: "Pembangunan Infrastruktur Gas Di Indonesia Dalam Rangka Mendukung Percepatan Infrastruktur Gas Bumi Nasional".**

Pembicara dalam webinar ini adalah Noor Arifin Muhammad (Direktur Perencanaan Dan Pembangunan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian ESDM), Heru Indriatno (Division Head, Project Control & Cost Management, PGN), Novias Nurendra (Direktur Operasi I, Utama Karya), Alex Kartono (Chief Representative Bourouge), moderator Achmad Widjaja (Vice Chairman FIPGB).

Latar Belakang dan Manfaat Pembangunan Jargas:

- Kebijakan Pemerintah untuk membangun kedaulatan dan kemandirian di bidang energi.
- Program Diversifikasi Energi, sebagai upaya pemanfaatan sumber energi dalam negeri, dengan penyediaan gas bumi untuk sektor rumah tangga.
- Kurang berkembangnya infrastruktur gas bumi di sektor rumah tangga. Badan usaha tidak tertarik mengembangkan Jaringan gas bumi untuk rumah tangga karena dinilai kurang ekonomis. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai inisiator pengembang jaringan gas bumi untuk rumah tangga.
- Penyediaan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan, dan efisien.

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan distribusi gas bumi nasional 2020-2030:

a) Rencana Ruas Transmisi

- Ruas Transmisi te in WNTS- Pemping
- Ruas Transmisi Cirebon - Semarang
- Ruas Transmisi KEK Sei Mangkei - Dumai

b) Rencana Wilayah Jaringan Distribusi : 71 Kabupaten/Kota

c) Rencana Pembangunan FSRU/FSU&FRU PT PLN (Persero): berdasarkan usulan PT PLN (Persero) dengan mempertimbangkan RUPTL 2019-2028 dan Kepmen ESDM Nomor 13/K13/MEM/2020.

d) Lokasi FEED DEDC Pembangunan Jargas RT dengan skema KPBU: 10 Juta SR di 52 Kabupaten/Kota (10 Provinsi)

Dampak pandemi Covid 19 menyebabkan penurunan ekonomi sehingga permintaan energi khususnya gas menurun, oleh sebab itu dibutuhkan langkah pemulihan disertai langkah persiapan mengingat peningkatan bauran gas pada 2025 hingga 2050.

Langkah yang dapat dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan seperti inovasi distribusi gas skala kecil terutama di Indonesia bagian timur, peningkatan jaringan gas rumah tangga serta adanya peraturan yang mendukung dalam peningkatan investasi dalam industri gas

Hutama Karya turut berkontribusi dalam pemulihan dan pengembangan pemanfaatan gas di Indonesia, dimana Utama Karya telah membangun infrastruktur jaringan gas, pembangkit listrik tenaga gas dan uap di beberapa wilayah di Indonesia serta penciptaan HIKKON Incinerator yang berbasis bahan bakar gas.

**2. Pada tanggal 8 November 2021, APLINDO menghadiri Undangan FGD Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Kajian Analisis Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Terhadap Sektor Industri, yang dilaksanakan secara virtual.**

Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian kemudian dilanjutkan pemaparan Analisis Dampak Kenaikan TDL oleh Ahmad Heri Firdaus (Center Of Industry, Trade, And Investment INDEF).

Di tahun 2021 Perlunya Menjaga Momentum Pertumbuhan Industri Pengolahan:

- Industri Alat Angkutan tumbuh 27,84% didukung kenaikan produksi kendaraan bermotor sebagai dampak pemberian insentif PPnBM.
- Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional tumbuh 9,71%, didukung oleh produksi farmasi dan obat-obatan untuk memenuhi permintaan domestik dalam penanganan COVID-19.
- Industri Logam Dasar tumbuh 9,52% sejalan dengan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan luar negeri yang tinggi.
- Industri Makanan dan Minuman tumbuh 3,49% didukung oleh peningkatan produksi CPO dan turunannya untuk memenuhi permintaan domestik dan luar negeri.
- Industri Karet, Barang dari Karet dan plastic berkontraksi 2,80% seiring dengan menurunnya pasokan bahan baku karet.

#### **A. Implikasi Kenaikan TDL**

- a. Kenaikan TDL akan berpengaruh pada:
  - Penambahan biaya overhead produksi yang mengakibatkan peningkatan biaya listrik dan biaya Harga Pokok Produksi (HPP).
  - Dengan peningkatan HPP, dapat terjadi peningkatan harga jual atau pengurangan keuntungan perusahaan
- b. Ketika HPP naik akan berdampak pada Harga Jual, sehingga berpotensi menurunkan permintaan *demand* barang / jasa. Selain itu, konsumen berpotensi memilih produk impor dengan harga jual yang lebih rendah. Hal ini dapat menurunkan daya saing produk lokal dibandingkan produk impor.
- c. Jika terjadi penurunan *demand* barang/jasa, secara langsung akan menurunkan utilitas produksi dan dapat terjadi pengurangan tenaga kerja (penurunan jumlah shift hingga PHK).
- d. Kenaikan TDL dapat mengganggu *Cash Flow* Perusahaan. Di era pandemik, perusahaan mengeluarkan extra cost untuk pencegahan virus Covid-19.
- e. Kenaikan TDL akan menjadi efek domino pada:
  - Harga bahan baku lokal pada industri intermediate dan industri hilir
  - Sebagai efisiensi maka perusahaan akan melakukan pengurangan karyawan (PHK)
  - Untuk perusahaan yang mengalami kondisi *survive* dalam masa pandemik, kemungkinan ada perusahaan yang tidak dapat melanjutkan usahanya karena biaya produksi yang naik signifikan akibat kenaikan TDL serta multi efek lainnya.
- f. Kenaikan harga jual barang produk dikhawatirkan akan menggerus pangsa pasar DN, selanjutnya dikhawatirkan akan meningkatkan impor, di sisi lain ekspor menurun karena kehilangan daya saing di negara mitra serta menurunnya kepercayaan pembeli luar negeri

- g. Turunnya daya saing produk industri terkait, sehingga tentunya menimbulkan dampak pengganda yang luas. Contoh kenaikan HPP industri kaca akan membebani industri otomotif dan konstruksi
- h. Dikhawatirkan akan melakukan efisiensi tenaga kerja dalam rangka menekan biaya
- i. Utilisasi industri dikhawatirkan akan turun sehingga akan berdampak pada berkurangnya penggunaan input lainnya

## **B. Rekomendasi Teknis**

- a. Penurunan Tarif TDL pada jam tertentu (22:00 s/d 05:00) atau fasilitas harga listrik tertentu (seperti pada gas untuk industry)
- b. Kepastian usaha dengan kebijakan - kebijakan pemerintah yang pro industri
- c. Pemerintah tetap membayarkan penuh kompensasi kepada PLN, sehingga tarif dasar listrik tidak perlu dinaikkan, dan perusahaan juga tidak perlu menaikkan harga jual barangnya, agar bisa bersaing kompetitif dengan produk impor.
- d. Pengurangan pajak Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pengurangan Pph
- e. Pelayanan *service* PLN ditingkatkan (tidak terjadi pemadaman listrik)
- f. Penghilangan biaya untuk penambahan / pengurangan tegangan listrik (KvA)
- g. Pembebasan Pajak pembelian listrik
- h. Pembatasan Impor produk tertentu agar industri dalam negeri tetap menjadi primadona

APLINDO memberikan usulan jika TDL naik maka akan berdampak pada daya saing produk dikarenakan harga mengikuti harga pasar, besaran biaya energi dalam struktur produksi pengecoran logam (16-25%) , ditambah dengan adanya penerapan pajak karbon pada 1 April 2021, hal ini tentu akan memberatkan industri dalam negeri.

## **3. Pada tanggal 11 November 2021, Ketua Umum APLINDO menjadi narasumber dalam Undangan Diskusi Identifikasi Kendala Utama Industri Manufaktur Dan Upaya Debottlenecking Untuk Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional, yang dilaksanakan secara virtual.**

Rapat dipimpin oleh Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Narasumber Ketua Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO), Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I), Ketua Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Chairman Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA).

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah terus berupaya mendorong pemulihan ekonomi, termasuk bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penjamin simpanan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan peluncuran "Paket Kebijakan Terpadu Untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi" Pada Februari 2021.

Secara historis, lintasan pertumbuhan sektor manufaktur sejalan dengan lintasan pertumbuhan PDB, dan sektor manufaktur secara konsisten menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, manufaktur juga mempunyai mitra UMKM dengan jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang relatif besar.

Penguatan strategi untuk mendukung prospek sektor manufaktur ke depan perlu diawali dengan identifikasi kendala utama yang tengah dihadapi dan dukungan yang diperlukan oleh pelaku usaha. Hal ini penting dalam mendukung formulasi kebijakan pemulihan yang lebih efektif dan tepat sasaran pada skala nasional. Strategi kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya mampu mendorong pemulihan aktivitas ekonomi khususnya sektor manufaktur yang terdampak pandemi Covid-19, namun juga mendukung pencapaian visi Indonesia 2045.

Berikut kendala utama yang paling memengaruhi perbaikan kinerja industri pengecoran logam yang dipaparkan oleh bapak Erwan Yulianto (Ketua Umum APLINDO):

Kebijakan pemerintah dalam penerapan PSBB dan protokol kesehatan yang ketat secara tidak langsung berimbas pada kelangsungan dunia usaha sehingga membuat daya beli turun, kemampuan produksi turun, bahan baku dari luar negeri sulit dan kurs dollar tinggi.

Penurunan kinerja industri terbantu oleh insentif pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 ditanggung pemerintah yang diperpanjang sampai Desember 2021 melalui PMK 149/2021.

Pengaruh pandemi Covid-19 untuk tahun 2021 diperkirakan belum berakhir, kinerja industri diperkirakan akan beranjak naik.

Kendala yang disedang dihadapi APLINDO:

- a. Rencana Kenaikan Tarif Listrik, dalam industri pengecoran energi mempunyai peranan dalam struktur biaya produksi, sehingga bila ada kenaikan tarif listrik akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap harga produk akhir dan daya beli masyarakat.
- b. Langka dan mahalnya bahan baku
- c. Di dalam negeri terjadi kelangkaan dan mahalnya bahan baku (skrap besi/skrup stainless steel/skrup aluminium/ingot aluminium)
- d. Untuk mendapatkan bahan baku di luar negeri, industri dihadapkan pada perizinan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai bahan baku industri (Permendag no.83/2020)
- e. Proses perizinan untuk import bahan baku lewat di Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Kementerian LHK cukup lama, lebih dari 3 bulan, sangat menguras waktu dan tenaga biaya dan kesempatan berproduksi
- f. Harga gas masih cukup mahal dan belum bisa mengacu seperti di ketentuan Perpres no 40/2016, yaitu sebesar 6 USD/MMBTU
- g. Kalah berkompetisi dengan produk produk dari luar , sehingga sampai saat ini ,masih banyak casting yang diimport untuk memenuhi kebutuhan domestic, ini tentu sangat merugikan Indonesia.

h. Kurang peduli dan kompak akan pentingnya memakai hasil industri dalam negeri dari pelaku bisnis

**4. Pada tanggal 12 November 2021, Pertemuan pengurus APLINDO (Bapak Iwan Lukito dan Bapak Rudy Ramadhan) dengan Kepala Sub Industri Non Logam, Bapak Sri Bimo Pratomo terkait permasalahan yang tengah dihadapi APLINDO yaitu langka dan mahal nya harga skrap stainless steel (SS) dan skrap aluminium di dalam negeri.**

Skrap tersebut diatas merupakan bahan baku utama di industri pengecoran logam dengan produk casting yang dihasilkan seperti alat kesehatan, komponen industry minyak dan gas, pompa, produk sanitary, komponen otomotif, ornament, komponen kereta api dan lain-lain.

Sesuai dengan arahan pada pertemuan tersebut, disampaikan bahwa APLINDO perlu membuat kajian sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan bea ekspor skrap SS dan aluminium serta kemudahan impor skrap aluminium, kebijakan ini dibuat untuk keterjaminan pasokan bahan baku dan berlangsungnya industri pengecoran logam di dalam negeri.

**5. Pada tanggal 11-12 November 2021, acara Bimtek Self-Assesment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0).**

Kementerian Perindustrian melalui Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan industri nasional yang kuat dan berdaya saing melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, termasuk Industri 4.0. Berkenaan dengan hal tersebut, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menyelenggarakan Bimtek Self-Assesment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) yang merupakan indeks acuan bagi industri dan pemerintah dalam mengukur tingkat kesiapan industri untuk bertransformasi menuju industri 4.0 di Indonesia. Kegiatan Bimtek ini diselenggarakan secara virtual pada tanggal 11-12 November 2021.

kegiatan Bimtek Akbar BSKJI 2021 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada industri tentang pentingnya penguatan industri melalui standardisasi, dan optimalisasi teknologi serta implementasinya bagi industri.

Disamping itu juga akan diberikan kiat-kiat penerapannya melalui contoh praktis yang sesuai dengan jenis dan karakteristik industri peserta, dengan tujuan akhir terjadinya efektifitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan industri, yang akhirnya akan mendukung meningkatnya daya saing industri nasional.

Dengan adanya Bimtek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi industri dalam peningkatan daya saing industri melalui penguatan sistem manajemen mutu yang berorientasi pada kualitas produk yang dihasilkan, selain itu menjadikan daya ungkit untuk mendukung produk yang berstandar nasional dan internasional.

**6. Pada tanggal 15 November 2021, APLINDO menghadiri FGD (Diseminasi) Studi Dampak Ekonomi Penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu Di Sektor ILMATE Untuk Peningkatan Daya Saing Industri, yang dilaksanakan secara virtual.**

Rapat dipimpin oleh Plt. Sekretaris Dirjen Kemenperin, Bapak Ali Murtopo Simbolon, Narasumber Tim LPEM UI dengan memaparkan “Studi Dampak Penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu di Sektor Industri Logam, Kendaraan Bermotor, Permesinan dan Elektronika.

Simpulan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi menetapkan 7 (tujuh) sektor industri yang berhak menerima HGBT yaitu sektor Industri Pupuk, Industri Petrokimia, Industri Oleochemical, **industri baja**, industri keramik, industri kaca; dan industri sarung tangan karet.
- b. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi telah memungkinkan untuk perluasan sektor penerimaan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diluar dari Tujuh (7) sektor yang telah ditetapkan. Pada Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Perubahan bidang industri yang dapat diberikan Harga Gas Bumi Tertentu ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Presiden.
- c. Direktorat Jenderal ILMATE telah menerima permohonan rekomendasi harga gas bumi tertentu dari sektor industri Baja, Logam, Kendaraan Bermotor (Komponen Otomotif), Permesinan, dan Elektronika melalui aplikasi SIINas. Data tersebut telah diverifikasi masing-masing Pembina industri baik dari isi maupun kelengkapan dokumen.
- d. Pada bulan Agustus 2021, Ditjen ILMATE telah menerima permohonan rekomendasi harga gas bumi sektor gas baru (akumulatif dari pengajuan periode – periode sebelumnya) yaitu:
- e. Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Jenderal ILMATE mengusulkan perluasan pengusulan penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sektor Logam, Kendaraan Bermotor, Permesinan dan Elektronika, dengan harapan akan meningkatkan daya saing industri nasional di sektor ILMATE.

| No | Sektor Industri    | Jumlah Industri Terverifikasi | Jumlah Kontrak Terverifikasi | Min Kontrak (BBTUD) | Max Kontrak (BBTUD) |
|----|--------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Logam              | 26                            | 28                           | 10,772              | 14,097              |
| 2  | Kendaraan Bermotor | 11                            | 16                           | 7,177               | 8,852               |
| 3  | Permesinan         | 5                             | 5                            | 0,365               | 0,528               |
| 4  | Elektronika        | 1                             | 1                            | 0,012               | 0,058               |
|    | Total              | 48                            | 55                           | 18,326              | 23,535              |

- f. Ditjen ILMATE bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (LPEM-UI) Menyusun kajian “Studi Dampak Ekonomi Penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu di Sektor ILMATE untuk Peningkatan Daya Saing Industri”. Kajian ini diharapkan

menjadi data dukung kajian ilmiah yang menguatkan pengusulan Harga Gas Bumi Tertentu sektor ILMATE.

- g. Tim LPEM-UI terpilih untuk Menyusun kajian ini dikarenakan telah menyusun Kajian Estimasi dan Simulasi Biaya dan Manfaat Penyesuaian Harga Gas Bumi Terhadap Perekonomian Nasional pada tahun 2015 yang membawa sektor Industri Baja sebagai penerima HGBT dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016.
- h. Diharapkan Ketika pengusulan sektor HGBT sektor industri Baja, Logam, Kendaraan Bermotor (Komponen Otomotif), Permesinan, dan Elektronika ditetapkan dalam Rapat Terbatas, Pemberian Gas dapat mempengaruhi perekonomian dan fiskal nasional:
  - Harga gas yang rendah akan menyebabkan industri bisa beroperasi optimal karena biaya energi sudah bukan menjadi hambatan dalam proses produksi. Jika industri beroperasi, kegiatan ekonomi sekitar pabrik juga akan bergerak, misalnya tenaga kerja pendukung yang diambil dari penduduk sekitar pabrik, penjual-penjual makanan untuk makan para buruh pabrik, penyedia jasa transportasi dan lain-lain. Selain itu fasilitas-fasilitas infrastruktur sekitar pabrik juga akan diperhatikan dan dibangun.
  - Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perdagangan internasional, dan juga kontribusinya terhadap keuangan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (misalnya provinsi). Gas bumi dalam konteks makro ekonomi dapat berkontribusi melalui beberapa sektor seperti sektor pertambangan dan penggalian (berupa pertambangan gas bumi), sektor industri pengolahan (berupa industri migas, yaitu gas bumi cair), dan sektor listrik, gas, dan air bersih (berupa gas kota).

#### **7. Pada tanggal 15 November 2021, APLINDO menghadiri webinar 12th KOMPAS100 CEO Forum Series 3 "Sustainability Action".**

Narasumber dari webinar tersebut adalah Arif Mujahidin, Communication Director Danone Indonesia, Daniel S. Purba Ketua Tim Ahli Kementerian Perdagangan RI Bayu Krisnamurthi, SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero), Edwin Nugraha Putra EVP Electricity System Planning PT PLN (Persero), Bernard A. Riedo Director Sustainability and Stakeholder Relations Asian)

Isu keberlanjutan menjadi isu yang krusial dan teramat penting dewasa ini. Bagi sebagian kalangan, keberlanjutan bahkan menjadi an endless issue yang terus mendapat perhatian dan pengelolaan dari waktu ke waktu.

Bagi dunia usaha, isu mengenai keberlanjutan menjadi bukan hanya menciptakan proses bisnis yang memastikan keberlanjutan lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial, tetapi juga sekaligus merupakan bagian dari memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan itu sendiri.

inisiatif-inisiatif yang dilakukan Danone Indonesia, selain juga menempatkan lingkungan alam sebagai bagian yang penting, juga menempatkan manusia sebagai sesuatu yang tak kalah penting.



Dua tahun terakhir situasi juga sangat penuh ketidakpastian. Tapi pihaknya percaya, jika diselesaikan bersama-sama, Indonesia akan melewati kondisi saat ini.

Sejauh ini Danone Indonesia turut mendukung prasarana kesehatan, vaksinasi. Ia melihat Indonesia saat ini mulai pulih, sangat terasa sekali di perusahaan. Produktivitas meningkat, kegiatan bisnis mulai terasa. Itu indikator yang sangat jelas bahwa Danone, sebutnya tidak bisa berdiri sendiri.

Sustainability sangat interconnected dan membutuhkan kolaborasi.

Menurut Daniel, bagi institusi usaha migas seperti Pertamina, yang memang padat modal dan mengandung risiko tinggi, menjalankan prinsip-prinsip sustainability dengan sendirinya, berarti memberikan kepastian usaha bagi perusahaan itu sendiri.

“Untuk upstream seperti produksi minyak, misalnya. Bisa jadi kita melakukan pengeboran hari ini, tetapi produksinya baru bisa kita lakukan dalam lima tahun ke depan. Atau untuk gas, kita eksplorasi, bersyukur bila mendapat gas hari ini, baru 10 tahun lagi baru bisa kita jual.

Untuk renewable energy yang hari ini secara portofolio bisnis (Pertamina) masih sekitar 1 persen, sangat kecil sekali. Tapi Pertamina sebutnya sudah punya rencana agar dalam 10 tahun ke depan, atau tahun 2030, renewable energy diproyeksikan sampai ke 17 persen.

Sementara EVP Electricity System Planning PT PLN (Persero) Edwin Nugraha Putra mengatakan PLN melakukan dua pendekatan konseptual terkait penggunaan energi dalam pembangkitan listrik. Kedua konsep ini, disampaikan Edwin, sangat tergantung dengan perkembangan teknologi.

Ke depan, lanjutnya PLN justru melihat masa depan akan mengandalkan penuh sumber energi terbarukan ini. Terkait hal ini, PLN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)-nya telah memasukkan energi baru dan terbarukan ke dalam RUPTL tersebut.

Penggunaan renewable energy seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), saat ini memang masih menghadapi tantangannya sendiri, terutama terkait intermentensi yang tinggi.

Sampai dengan teknologi ini berkembang, maka untuk keberlangsungan bisnis dan keberlangsungan kelistrikan, energi fosil yang kita pakai harus dilengkapi dengan peralatan teknologi yang dapat mereduksi emisi yang dihasilkan.

Industri sawit termasuk industri yang heavy regulated. Ada banyak standar-standar yang harus diterapkan, yang bahkan lebih banyak bila dibandingkan dengan industri minyak nabati lainnya.

Asian Agri sebutnya telah 30 tahun memiliki pengalaman dalam hal bermitra, dimulai dari program PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat). Kemitraan itu sudah masuk ke generasi kedua, yang mana untuk generasi kedua tidak hanya untuk kebunnya saja yang melalui mekanisme replanting, tetapi juga dari sisi yang mengelola, atau petaninya sendiri yang sudah masuk ke generasi kedua.

Salah satu yang jadi semangat Sustainable Development Goals (SDGs) ini bukan regulasi. Yang ditetapkan itu tujuan, caranya kembali ke pelaku industri sesuai dengan karakteristik masing-masing industri.

Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Itu jadi pegangan. Sangat detail, sangat teknis di dalamnya.

Mulai dari 17 tujuan dalam SDGs diterjemahkan menjadi target, dari target menjadi indikator, dan kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

**8. Pada tanggal 15 November 2021, rapat pengurus APLINDO pembahasan draft kajian skrap SS dan Aluminium yang akan disampaikan ke Kementerian Perindustrian.**

Rapat dipimpin oleh Ketua Umum APLINDO Bapak Erwan Yulianto dan dihadiri oleh Ibu Caterin Widjaja, Bapak Awad Umar, bapak Iwan Lukito, Bapak Erwin Halim, Bapak Kukuh Anggoro, Bapak Allan Changrawinata, dan Bapak Rudi Ramadhan, membahas draft kajian dalam penerapan bea ekspor skrap SS dan aluminium serta kemudahan impor skrap aluminium.

Kebijakan ini dibuat untuk keterjaminan pasokan bahan baku dan berlangsungnya industri pengecoran logam di dalam negeri, kajian ini dibuat sesuai arahan pada pertemuan pengurus APLINDO (Bapak Iwan Lukito dan Bapak Rudy Ramadhan) dengan Kepala Sub Industri Non Logam, Bapak Sri Bimo Pratomo pada tanggal 12 November 2021.

Kajian telah dikirimkan pada tanggal 22 November 2021.

**9. Pada tanggal 18 November 2021, APLINDO menghadiri Talkshow 12th KOMPAS100 CEO Forum "Ekonomi Sehat 2022".**

Talkshow dihadiri oleh Airlangga Hartarto - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan RI, Budi Gunadi Sadikin - Menteri Kesehatan RI, David Fernando Audy - Operating Partner East Ventures dan Moderator : Chatib Basri.

Dalam forum tersebut, sejumlah isu krusial yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, kebijakan, dan kemungkinan yang akan datang di 2022 menjadi bahasa utama, khususnya yang berkaitan dengan Covid-19. Untuk mengatasi krisis harus menggabungkan dua sektor, yaitu kesehatan dan ekonomi. Hal ini membutuhkan komunikasi dan interaksi lebih lanjut.

Menurut Budi, strategi kesehatan yang tepat seharusnya bukanlah strategi mengobati orang sakit, melainkan strategi menciptakan orang sehat dan mencegah orang jadi sakit. Hal inilah yang menurutnya akan menjadi bagian transformasi yang dilakukan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, semua elemen masyarakat mengharapkan pemulihan yang mulus untuk menuju ekonomi sehat 2022. "Akan tetapi, masih ada ancaman inflasi lantaran pertumbuhan yang belum kuat bisa menimbulkan masalah yang pelik dan dilema. Untuk itu, harus betul-betul memperhatikan tantangan tersebut.

Menanggapi Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya tak menampik perihal akan ada tantangan baru di masa pemulihan ekonomi 2020, seperti iklim geopolitik global dan perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan. "Saat ini merupakan golden moment bagi Indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di 2022 walau masih ada tikungan.

Sri Mulyani pun kembali melanjutkan, pihaknya masih mempertahankan dukungan APBN terhadap sektor kesehatan dengan nominal yang masih cukup besar demi menjaga Covid-19 terkendali.

"Dari sisi vaksinasi, testing, tracing, maupun berbagai tagihan. Saya menjaga APBN karena kami berkaca dengan menghitung yang sakit di 2020-2021 cukup banyak. Kemudian, 2022 juga kita makesure terlebih dahulu agar vaksinasi bisa berjalan terus.

"Saat ini, fokus pemerintah yang terpenting adalah masyarakatnya selamat dan ekonominya selamat. Instrumen APBN adalah tool. Jangan dibalik, APBN-nya selamat, tetapi ekonomi dan masyarakatnya malah tidak selamat," ungkap Sri Mulyani. Walau demikian, lanjutnya, APBN tidak boleh terus-menerus dipakai secara berlebihan. Saat ekonomi sudah berangsur pulih, masyarakat aman, APBN harus disehatkan.

### **Transisi energi**

"Selama ini, bauran energi Indonesia base load disediakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sehingga kalau pensiunkan PLTU harus mencari base load energi yang baru. Ini bisa disediakan melalui hydropower atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA)," papar Airlangga. Sayangnya, situasi saat ini masih belum memungkinkan pemerintah untuk membangun hydropower di Pulau Jawa. Padahal, kebutuhan listrik paling besar di Indonesia ada di Pulau Jawa.

### **Pesan Presiden Joko Widodo**

Beliau menegaskan poin paling penting untuk meningkatkan sektor ekonomi dan kesehatan pada tahun 2022 adalah dengan mengendalikan pandemi covid-19.

Dalam mewujudkan pengendalian tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan cara-cara yang ditempuh supaya aktivitas ekonomi semakin leluasa lagi. Jokowi pun menjelaskan salah satunya caranya ialah dengan melakukan proses vaksinasi yang merata di setiap provinsi. Lewat proses vaksinasi yang semakin merata, indikator terbukanya aktifitas ekonomi juga semakin meningkat. Pembangunan infrastruktur akan menjadi pondasi kuat bagi berkembangnya sektor ekonomi pada tahun 2022.

Indonesia secara bertahap akan melarang ekspor barang mentah (industri) misalnya seperti nikel, bauksit, tembaga dll.

Potensi Indonesia memiliki kekuatan besar dalam hal Green Industrial dan potensi Hydropower.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki kemampuan yang besar dalam bidang teknologi digital. "Indonesia memiliki 2.229 startup.

Potensi ekonomi digital kurang lebih 124 miliar dollar Amerika Serikat (AS) sampai 2025. Tinggal bagaimana menyiapkan infrastruktur, pemerintah, ekonomi, dan masyarakat digital agar dapat muncul sebuah ekosistem digital yang besar.

Menanggapi Presiden Jokowi, Operating Partner East Ventures David Fernando Audy mengatakan, kehadiran pandemi Covid-19 di Tanah Air telah menciptakan akselerasi luar biasa dalam hal transformasi digital.

**10. Pada tanggal 18 November 2021, APLINDO menghadiri rapat RSNI 3 Perumusan Standar Bentonite untuk Foundry.**

Rapat dipimpin oleh ketua Komtek 81-04 Ibu Ade Umyy Kalsum dan keputusan rapat menyetujui RSNI Bentonite untuk Foundry dan saat ini masuk dalam proses jejak pendapat.

**11. Pada tanggal 23 November 2021, APLINDO menghadiri rapat Pembahasan SE Menperin Dengan Asosiasi Industri Tentang PPKM Nataru 2021, yang dilaksanakan secara virtual.**

Rapat dipimpin oleh Bapak Direktur Perwilayahan Industri selaku Sekretaris Tim Pemantau IOMKI Bapak Adie Rochmanto Pandiangan.

Isi Surat Edaran Menteri Perindustrian:

- A. Pimpinan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya pada periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, terhitung tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022 melalui:
  - a) Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah selama periode libur Hari raya Natal dan Tahun Baru bagi Karyawan dan/atau keluarganya; dan
  - b) Pengetatan pemberian cuti bagi pekerja industri.
- B. Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah bagi pekerja industri.
  - a) Pimpinan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri melarang karyawan untuk bepergian keluar daerah selama periode libur Hari raya Natal dan Tahun Baru.
  - b) Pelarangan kegiatan bepergian keluar daerah sebagaimana pada poin a dapat dikecualikan bagi:
    - karyawan yang akan melakukan tugas kedinasan; dan
    - karyawan yang bertempat tinggal dan lokasi bekerjanya berada di dalam satu wilayah aglomerasi seperti contohnya Jabodetabek, Bandung Raya, Yogya Raya, Solo Raya, Kedungsepur, maupun Mebidangro.
  - c) Pengecualian pembatasan bepergian bagi Karyawan yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian dengan ketentuan selain sebagaimana diatur dalam poin b dapat diberikan sesuai dengan kebijakan masing – masing pimpinan perusahaan, misalkan dengan memberlakukan kewajiban pelaporan secara

rutin dan real time (share location) dalam rangka memonitor/mengawasi keberadaan karyawan selama periode libur Hari raya Natal dan Tahun Baru.

- d) Dalam kondisi tertentu yang mengharuskan karyawan dan keluarganya melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, Pimpinan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus dapat memastikan agar karyawan dan/atau keluarganya selalu memperhatikan : Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19; Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang; Kriteria persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- C. Pengetatan pemberian cuti bagi pekerja industri. Pimpinan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri melakukan pembatasan pemberian cuti selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 bagi Karyawannya.a. b. Pemberian cuti selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 hanya dapat diberikan dalam kondisi tertentu, yaitu :
- a)Karyawan yang bersangkutan sakit dan/atau dalam keadaan hamil dan membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan persalinan di luar daerah domisili tempat tinggalnya;
  - b)Keluarga inti karyawan meninggal/sakit;
  - c).????; dan/atau 4) Kegiatan yang tidak dapat ditunda dan/atau diwakili pelaksanaannya.
- D. Pemberian cuti di lingkungan perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan Industri selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 sesuai dengan kebijakan perusahaan dan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Pimpinan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan terkait pemberian cuti karyawan selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 secara berkala setiap minggu melalui SIINAS dalam menu pelaporan 4. IOMKI. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melaksanakan hidup bersih dan serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu : Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilitas & Interaksi, Treatment Testing Tracing

- E. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- Peringatan tertulis; dan/atau
  - Pencabutan IOMKI.
- F. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa penetapan PPKM level 3 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**12. Pada tanggal 25 November 2021, Wakil Ketua Umum Bapak Iwan Lukito menjadi Narasumber dalam FGD Logam -Circular Economy, Pemetaan potensi circular economy sektor industri (dalam rangka penyusunan roadmap circular economy sektor industri).**

Narasumber dalam FGD tersebut adalah Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO), PT Krakatau Steel dan PT. Smelting.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyebutkan bahwa arah RPJMN 2020-2024 untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industrialisasi yaitu diantaranya melalui penguatan circular economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah. Hal ini sejalan dengan penerapan Industri Hijau yang mengutamakan efisiensi dalam proses produksi untuk peningkatan daya saing dan keberlanjutan industri. Penerapan konsep circular economy dinilai dapat meningkatkan daya saing industri, substitusi bahan baku impor, serta mengatasi permasalahan lingkungan secara holistik dan menyeluruh.

Berikut adalah paparan yang disampaikan Wakil Ketua Umum APLINDO dengan tema Potensi Perkembangan Bisnis Industri Pengecoran Logam di Indonesia:

**Dampak Pandemi Covid-19 terhadap persediaan bahan baku Scrap**

- Permintaan pasar dunia yang menurun pada masa – masa awal pandemi menyebabkan rendahnya kegiatan produksi dunia hingga mengakibatkan sisa dari hasil produksi dan konsumsi logam menurun.
- Trend pasar yang mulai kembali bangkit menyebabkan kebutuhan terhadap bahan baku dan komoditas meningkat tajam, contoh : batu bara, minyak bumi, dan **scrap besi & baja**.
- Kelangkaan scrap besi & baja tersebut mengakibatkan harga pasar lokal scrap meningkat tajam.
- Tingginya harga pasar internasional dibanding **scrap stainless steel & alumunium** Indonesia menyebabkan terjadinya ekspor secara besar – besaran scrap tersebut keluar negeri yang menyebabkan pengecoran logam stainless steel & alumunium Indonesia kehabisan bahan baku.

**Permasalahan dan Masukan (1)**

- Scrap besi & baja adalah salah satu komoditas nasional yang dilarang ekspor.
- Kekurangan scrap besi & baja menyebabkan tingginya nilai pasar melebihi pasar luar negeri.

- Kondisi ini disebabkan karena proses importasi scrap besi & baja melalui birokrasi yang relatif panjang, diterapkannya kuota impor, dan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya.
- Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan dukungan pemerintah untuk mempermudah proses impor scrap besi & baja sebagai penyeimbang harga pasar di Indonesia.
- Kebijakan ini akan memicu penggunaan scrap besi & baja yang dihasilkan di Indonesia dalam rangka *circular economy*, sekaligus meningkatkan tingkat kompetitif produk pengecoran logam Indonesia di pasar dunia.

### **Permasalahan dan Masukan (2)**

- Scrap stainless steel & alumunium adalah komoditas yang diperbolehkan ekspor.
- Tingginya jumlah permintaan scrap stainless steel & alumunium di luar negeri menimbulkan harga pasar internasional yang lebih tinggi dari pasar lokal dan menyebabkan ekspor besar – besaran scrap tersebut keluar negeri.
- Hal ini menimbulkan kelangkaan bahan baku scrap stainless steel & alumunium di Indonesia yang mengancam keberlangsungan produksi pengecoran logam material tersebut.
- Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan dukungan pemerintah untuk menerapkan pelarangan atau bea ekspor scrap stainless steel & alumunium agar dapat digunakan oleh industri pengecoran logam terlebih dahulu.
- Kebijakan ini akan mencegah ekspor scrap stainless steel & alumunium yang tidak memiliki nilai tambah, menjamin ketersediaan bahan baku produksi untuk industri nasional, memberikan nilai tambah pada scrap tersebut, yang kemudian juga menjadi kontributor terhadap kebijakan *circular economy* nasional.
- Kebijakan bea ekspor scrap telah diterapkan oleh pemerintah RRC sebesar 45% dan terbukti efektif menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri untuk diolah menjadi produk dengan nilai tambah sebelum diekspor.

Jakarta, 9 Desember 2021

Sekretariat APLINDO.